

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini akan membahas tentang Kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi para imigran dan pengungsi yang semakin hari semakin bertambah di Eropa. Uni Eropa adalah sebuah organisasi kerjasama regional yang paling maju di dunia. Uni Eropa merupakan kelompok 27 negara-negara independen yang unik dengan lebih dari 500 juta warga negara yang tinggal dalam batas wilayahnya. Bagi warga Eropa, organisasi ini juga berhasil merubah tingkat kehidupan lebih dari 500 juta warga Eropa dan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat dan negara yang memiliki ekonomi dan perdagangan dengannya. Uni Eropa pada saat ini semakin diakui sebagai aktor penting di panggung internasional. Negara-Negara Anggota terikat di dalam Uni Eropa dengan serangkaian traktat yang telah mereka tandatangani seiring dengan perkembangannya. Semua traktat itu harus disepakati oleh masing-masing Negara Anggota dan kemudian diratifikasi baik oleh parlemen nasional atau melalui referendum. (European Union Development Co-Operation in Indonesia, 2006). Wilayah Eropa menjadi salah satu destinasi utama bagi para imigran. tingginya tingkat imigran sebagai badan integrasi yang memiliki karakter supranasionalisme, Uni Eropa memiliki kewajiban atas keamanan bagi negara - negara anggotanya. Permasalahan imigran yang dilanda oleh negara Eropa sebenarnya adalah permasalahan yang sudah sangat biasa bagi negara-negara di Eropa.

Kemudian, Uni Eropa sepakat membuat Kebijakan Dublin Agreement atau disebut juga Dublin III regulation pada tahun 2013. Dublin Agreement adalah mekanisme di Uni Eropa, yang membantu mengidentifikasi negara mana yang bertanggung jawab untuk memproses permohonan suaka seseorang yang berasal dari negara non-UE atau orang tanpa kewarganegaraan. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk menentukan negara mana yang bertanggung jawab untuk memproses permohonan pencari suaka. Biasanya, ini adalah negara anggota UE pertama tempat dimana para migran menginjakkan kaki yang diajukan oleh orang-orang yang mencari perlindungan internasional berdasarkan Konvensi Jenewa dan Petunjuk Kualifikasi UE, di dalam Uni Eropa. (Gopalakrishnan, 2020)

Permasalahan krisis imigran dan pengungsi menjadi sebuah fenomena internasional yang membuat Uni Eropa sebagai badan integrasi harus berkerja keras

agar penanganan krisis tersebut dapat terselesaikan dan juga dapat mensejahterakan baik dari negara anggota Uni Eropa maupun pada imigran. Pada tahun 2015, sebanyak 5,2 juta pengungsi dan migran yang sudah sampai menuju daratan Eropa (The UN Refugee Agency, 2017)

Krisis migran yang terjadi saat ini, sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2014. Berdasarkan data dari UNHCR, pada tahun 2014 telah terjadi kenaikan jumlah pencari suaka lebih besar dari jumlah tahun 2013. Hal ini diakibatkan oleh konflik berkepanjangan dan ketidakstabilan di negara-negara Timur Tengah lainnya. Di wilayah Eropa, kenaikan jumlah pencari suaka sebesar 24% pada tahun 2014 yaitu sejumlah 216.300 orang dan pada tahun 2015 menjadi kurang lebih 1 juta orang yang artinya naik sebesar kurang lebih 5 kali lipat. Tingginya gelombang imigran dan pencari suaka ini telah mengakibatkan ketegangan yang luar biasa di antara negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Negara-negara yang menjadi masuknya para imigran seperti Hungaria, Yunani, dan Italia sangat keberatan dengan banyaknya pengungsi di negara mereka. Negara-negara tersebut kemudian pun mendesak Uni Eropa untuk melakukan pembicaraan terkait dengan pemerataan imigran ke negara-negara anggota lainnya. Tuntutan tersebut kemudian ditanggapi dengan cara membuka negosiasi tentang pemberlakuan kuota imigran di negara-negara anggota Uni Eropa. Karena, Uni Eropa telah banyak menerima gelombang pengungsi dan imigran masuk ke wilayahnya sejak lama.

Isu imigran telah sejak lama menjadi perhatian dari kawasan Uni Eropa. Masuknya gelombang pengungsi di kawasan Eropa sangat dipermudah karena letak geografis Timur Tengah dan Eropa yang sangat dekat. Negara-negara di Uni Eropa bahkan mengeluarkan kebijakan terkait isu pengungsi tersebut. Negara anggota seperti Jerman dan Prancis pun juga ikut menerima dengan baik para pengungsi, selain itu terdapat juga Negara anggota lain yang menolak untuk menerima pengungsi yaitu Negara-negara di Eropa Timur. Hal ini menjadi dasar bagi Uni Eropa membentuk sebuah kebijakan yg khusus mengatur masalah penerimaan pengungsi di Negara anggota Uni Eropa.

Para Imigran memilih Eropa sebagai negara pilihan untuk pindah karena di Timur Tengah sendiri tidak memiliki jaminan keamanan yang memadai bagi para pengungsi atau pun imigran. Contohnya pada kasus pengungsi Suriah, pemerintah penerima pengungsi di Timur Tengah sendiri dan mengalami kewalahan dengan jumlah volume kedatangan para pengungsi yang sangat banyaknya, sehingga tidak

sedikit pemerintahan negara-negara Timur Tengah yang memutuskan untuk memperketat pemasukan pengungsi atau imigran yang biasa dilakukan dengan melarang untuk tinggal. Situasi keamanan di negara-negara Timur Tengah juga tidak aman seperti di Eropa. Sebelum terjadinya krisis pengungsi yang ada di Eropa, sebenarnya para imigran yang berdatangan memberikan sedikit dampak positif karena kehadiran mereka yang membantu permasalahan tenaga kerjasi di negara-negara Eropa. Namun, pertumbuhan migran yang masuk ke negara-negara Eropa juga memberi dampak negatif baik dari segi ekonomi, keamanan negara dan agama di negara-negara Eropa sendiri. (bbc.com, 2016).

Uni Eropa sebagai pihak yang menerima para imigran ternyata tidak lepas juga dari banyaknya permasalahan. Jumlah imigran yang mengajukan permintaan suaka ternyata tidak tersebar secara merata ke seluruh negara anggota nya. Terdapat beberapa negara yang menerima permintaan suaka dan ada juga beberapa negara yang menolak. Dampak dari pengungsi dan imigran yang datang ke Eropa juga tidak lepas dari protes para warga, yang dimana warga mulai merasa tidak nyaman dikarenakan melonjaknya jumlah imigran yang masuk ke negara mereka. warga Uni Eropa akhirnya mulai resah karena kebudayaan yang dibawa oleh pengungsi akan sangat berpengaruh terhadap masa depan mereka di negara mereka sendiri. Hal tersebut yang menjadi dasar Uni Eropa membentuk sebuah kebijakan khusus yang mengatur masalah penerimaan imigran dan suaka di Negara anggota Uni Eropa. Dengan ini diharapkan Uni Eropa agar semua negara anggota juga ikut bertanggung jawab dalam perlindungan imigran-imigran di negara mereka masing-masing.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: *“Bagaimana kebijakan Uni Eropa dalam menghadapi krisis imigran yang berupaya masuk ke negara anggota Uni Eropa?”*

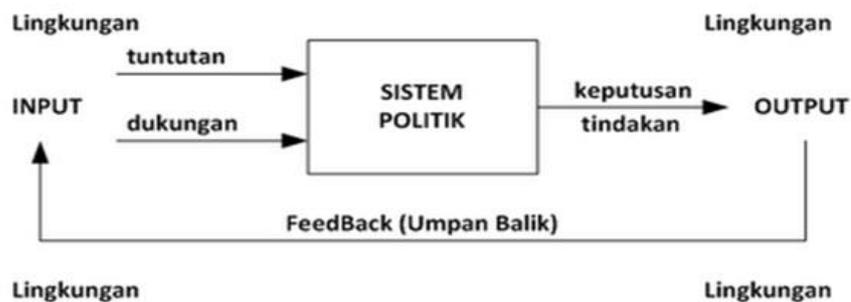
C. Kerangka Teori

Teori Pembuatan Keputusan David Easton

Teori pembuatan keputusan yang dikemukakan oleh David Easton yang juga sering disebut sebagai analisa sistem politik. Menurut David Easton, sistem politik adalah yang memiliki batasan merupakan alokasi dari pada nilai-nilai, dimana pengalokasiannya tersebut bersifat memaksa atau dengan kewenangan dan

pengalokasian tersebut mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa sistem politik dapat diperkenalkan sebagai seperangkat interaksi yang diabstaksikan dari seluruh tingkah laku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat (Haryanto, 1982) .

Menurut David Easton, sistem politik memiliki empat ciri khas, pertama ciri-ciri identifikasi dimana ciri identifikasi berguna untuk menggambarkan unit-unit dasarnya dan membuat garis batas yang memisahkan unit-unit itu dari unit-unit yang ada diluar 7 sistem politik. Kedua, input dan output masyarakat tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem politik. Ketiga, diferensiasi dalam suatu sistem pembagian kerja yang memberikan suatu struktur tempat berlangsungnya kegiatan itu. Dan keempat yaitu integrasi dalam suatu sistem dimana mekanisme yang digunakan untuk bekerjasama walaupun dalam kadar minimal sehingga dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang otoritatif atau kekuasaan yang mengikat. (Mohtar, 1990)



Gambar 1. Teori Sistem Politik David Easton (Darry, M, 2013)

Teori pembuatan keputusan yang dikemukakan oleh David Easton tersebut, sering juga disebut dengan analisis sistem politik dalam sebuah negara, terutama dalam pembuatan sebuah kebijakan. Dengan menggunakan teori, ini maka dapat diketahui bagaimana sebuah sistem politik disebuah negara berjalan dan bagaimana prosedur pembuatan kebijakan-kebijakan publik. Proses input atau masukan, yaitu sebuah proses dimana sebuah pemerintahan menghimpun dan menampung sekaligus masukan dari berbagai pihak maupun elemen disebuah negara, untuk kemudian hari dijadikan bahan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Ada dua jenis input dalam suatu sistem politik; yaitu tuntutan dan dukungan. Input -input inilah yang memberikan bahan mentah atau

informasi yang harus diproses oleh sistem politik dan juga energi yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup sistem politik.

Alasan sistem politik terbentuk dalam suatu masyarakat karena adanya tuntutan dari orang-orang atau kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut yang tidak semuanya dapat dipengaruhi dengan memuaskan. Beberapa dari tuntutan akan hal-hal yang relatif langka itu tidak pernah masuk kedalam sistem politik sebelum dipenuhi melalui perundingan pribadi atau penyelesaian-penyelesaian oleh orang-orang yang terlibat didalamnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pengambilan keputusan David Easton, karena dalam hal ini Uni Eropa mendapatkan tuntutan dari negara-negara anggotanya terkait masuknya imigran asing secara terus-menerus yang semakin meningkat tiap tahun. Karena para imigran tersebut dengan jumlahnya yang cukup banyak dan belum ada regulasi untuk mengatur terkait hal tersebut, maka setelah berhasil masuk dan diterima oleh Uni Eropa tuntutan tersebut kemudian di tindak lanjuti oleh Uni Eropa melalui kebijakan *New Pact on Migration And Asylum 2020*. Setelah kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Dewan Uni Eropa, kebijakan tersebut kemudian mendapat feedback berupa respon positif dari para negara-negara anggota Uni Eropa.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka teori yang telah di paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara dalam penelitian ini bahwa: kebijakan Uni Eropa menghadapi para imigran yang berupaya masuk ke negara anggota Uni Eropa dengan mengeluarkan kebijakan baru yakni Kebijakan *New Pact on Migration And Asylum* yang intinya adalah sebagai perlindungan baru suaka di UE menggantikan *Dublin Regulation III*.

E. Metode Penelitian dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan rumusan masalah. Metode penelitian kualitatif sendiri adalah sebuah metode pendekatan yang bersifat eksplorasi yang digunakan oleh seorang individu atau kelompok untuk memahami alasan dan opini. penulis akan mengambil untuk melakukan penelitian sejarah, studi kasus. Tahapan penelitian kualitatif sendiri tidak menggunakan data statistik, melainkan melalui proses pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan (Johan Setiawan, 2018).

Dalam pengolahan data, penulis melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang berdasarkan data seperti buku, jurnal, website lembaga-lembaga terkait, dan juga laporan-laporan terkait penelitian serta penelitian- penelitian sebelumnya yang masih memiliki hubungan dengan kasus yang diteliti oleh penulis.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi sebuah karya tulis, maka penulis membatasi jangkauan penelitian agar tidak terlalu luas pembahasannya. Jangkauan pada tulisan penelitian ini berfokus pada New Pact on Migration and Asylum tahun 2015-2020. Fungsi dari pembatasan ini untuk mempermudah penulis dalam mencari data mengenai sistem kebijakan New Pact On Migration and Asylum.

G. Sistematika Penulisan

Tulisan ini akan terdiri dari 3 bab. yaitu:

Bab I Membahas mengenai Latar Belakang masalah imigran yang masuk ke uni eropa, menjawab rumusan masalah, membuat erangka pemikiran atau teori , merancang hipotesis, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian, Jangkauan Penelitian.

Bab II Membahas mengenai permasalahan yang terjadi di Uni Eropa sejak tahun 2015 beserta kebijakan-kebijakan yang ada di uni eropa.

- A. Permasalahan Pengungsi dan Kebijakan Uni Eropa
- B. Krisis Pengungsi di Uni Eropa sejak tahun 2015
- C. Inti Kebijakan baru 'New Pact On Migration and Asylum 2020'

Bab III Membahas kesimpulan dan penutup dari skripsi ini.